



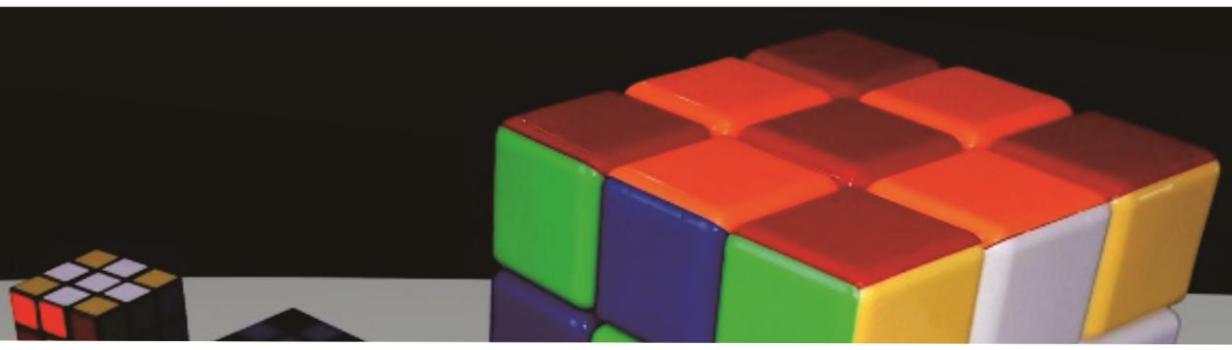
# RENCANA KERJA TAHUN 2023



A photograph of a landscaped park area. In the foreground, there are several manicured bushes in shades of red, orange, and green. Behind them is a paved walkway. In the background, there is a large, modern-looking structure with the words "KOTA GRESIK" written on it. To the right, there is a traditional multi-tiered Balinese-style temple. The sky is clear and blue.

KOTA GRESIK

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GRESIK





**PERATURAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR: 401 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN GRESIK  
TAHUN 2023**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN GRESIK**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 19 ayat (4) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan Peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023;

### Pasal 1

Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2023 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN  
LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN  
PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN  
PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH

BAB V : PENUTUP

### Pasal 2

Uraian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

### Pasal 3

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2023;

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Gresik  
Pada tanggal : 18 Juli 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN GRESIK



**NANANG SETIAWAN, S.I.P., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700105 199003 1 008

# **RENJA**

## **TAHUN 2023**



**BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK**

**KABUPATEN GRESIK**

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
<b>Latar Belakang .....</b>	<b>3</b>
<b>Landasan Hukum.....</b>	<b>3</b>
<b>Maksud dan Tujuan.....</b>	<b>5</b>
<b>Sistematika Penulisan.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....</b>	<b>10</b>
<b>Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....</b>	<b>10</b>
<b>Analisis Kinerja Pelayanan PD .....</b>	<b>24</b>
<b>Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....</b>	<b>27</b>
<b>Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....</b>	<b>28</b>
<b>Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>41</b>
<b>Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....</b>	<b>41</b>
<b>Tujuan dan Sasaran Renja PD.....</b>	<b>42</b>
<b>Program dan Kegiatan .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>66</b>
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>82</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Rencana kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rancangan rencana kerja tersebut mengacu pada perencanaan dari pemerintah daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga Renja harus tetap mengacu pada kaidah-kaidah dan peraturan yang berlaku dan berpedoman pada Visi dan Misi yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja yang disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik memuat kebijakan publik dan arah kebijakan dalam mencapai taget melalui rencana, program, dan penganggaran tahunan yang telah ditentukan. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi acuan penyusunan Renja adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;
- e. Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, RPJMD, RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Renja sendiri memiliki fungsi sebagai dasar pelaksanaan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra PD serta merupakan bahan pertimbangan untuk tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Rencana Kerja yang disusun juga tidak mengesampingkan keterkaitan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah tingkat provinsi dan tingkat pusat. Di harapkan penyusunan Rencana Kerja mampu memuat kebijakan publik dan arah pembangunan selama setahun serta dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen dan mampu menjadi panduan dasar dalam meningkatkan laju pengembangan pembangunan yang harus dilaksanakan secara konsisten, berimbang, tepat sasaran dan berkualitas.

### **Landasan Hukum**

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5899 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kabupaten Gresik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
19. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 26 tahun 2021 tentang rencana strategis perangkat daerah tahun 2021-2026.
20. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten gresik Tahun 2023.

**Maksud dan Tujuan****Maksud :**

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dan evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023;

**Tujuan :**

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) bertujuan sebagai rumusan program, dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik tahun 2023.

**Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

**BAB II****HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021****Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Pada tahun 2021, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 1 tahun dapat diketahui dengan melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun 2021 dan APBD Kabupaten Gresik. Evaluasi ini ditujukan sebagai bahan penyusunan terhadap Renja yang akan datang.

Plafon anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik tahun 2021 yaitu Rp. 6.608.386.615.

Berikut akan disajikan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatan serta sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan DPA tahun berjalan (tahun 2021).

Adapun gambaran selengkapnya tentang evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2021, disajikan sebagaimana tabel TC.29 sebagai berikut:

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)**  
**Kabupaten Gresik**

Perangkat Daerah : BAKESBANGPOL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Programdan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (RenjaSKPD tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
8.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang di susun	55 laporan	11 laporan	11 laporan	11 laporan	100%	11 laporan	11 laporan	100%
8.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan perangkat daerah yang terbayar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
8.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum perangkat Daerah yang disediakan	220 Jenis 5 Tahun 60 Jenis 15 Jenis 5 Tahun	44 Jenis 1 Tahun 12 Jenis 3 Jenis 1 Tahun	44 Jenis 1 Tahun 12 Jenis 3 Jenis 1 Tahun	44 Jenis 1 Tahun 12 Jenis 3 Jenis 1 Tahun	100% 100% 100% 100% 100%	44 Jenis 1 Tahun 12 Jenis 3 Jenis 1 Tahun	44 Jenis 1 Tahun 12 Jenis 3 Jenis 1 Tahun	100% 100% 100% 100% 100%	

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021- 2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
8.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	30 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	6 Orang	6 Orang	100%	
8.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara	5 Unit 10 Unit 140 Unit	1 Unit 2 Unit 28 Unit	1 Unit 2 Unit 28 Unit	1 Unit 2 Unit 28 Unit	100% 100% 100%	1 Unit 2 Unit 28 Unit	1 Unit 2 Unit 28 Unit	100% 100% 100%	
8.1.2	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Prosentase potensi konflikterkait Ipoleskosbud yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
8.1.2.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Satuan Lembaga Pendidikan yang Menerima Penguanan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		61 Kali 40 Kali	14 Kali 8 Kali	14 Kali 8 Kali	14 Kali 8 Kali	100% 100%	5 Kali 8 Kali	5 Kali 8 Kali	100% 100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
8.1.3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Prosentase partisipasi politik Masyarakat dalam Berdemokrasi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
8.1.3.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik	5 Tahun 40 Parpol	1 Tahun 8 Parpol	1 Tahun 8 Parpol	1 Tahun 8 Parpol	100% 100%	1 Tahun 8 Parpol	1 Tahun 8 Parpol	100% 100%	

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
8.1.4	PROGRAM PEMERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Prosentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Berkinerja Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
8.14.2.01	Perumusan KebijakanTeknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah peserta, program kerja, kebijakan dan monev kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasanorganisasi kemasyarakatan	250 LSM dan ORMAS	50 LSM dan ORMAS	50 LSM dan ORMAS	50 LSM dan ORMAS	100%	50 LSM dan ORMAS	50 LSM dan ORMAS	100%

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
8.1.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,DAN BUDAYA		Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.1.5.2.01	Perumusan KebijakanTeknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah pesertayang mengikutikegiatan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	55 Kali 10 Kali 55 Kali	11 Kali 2 Kali 11 Kali	11 Kali 2 Kali 11 Kali	100% 100% 100%	11 Kali 2 Kali 11 Kali	11 Kali 2 Kali 11 Kali	100% 100% 100%	

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
8.1.6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Prosentase konflik sosial yang di selesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Urusan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun (2021-2026)	Realisasi Target KinerjaHasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
						Target Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
8.1.6.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Peserta Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	15 Kali 60 Kali 60 Kali 55 Kali 55 Kali	3 Kali 12 Kali 12 Kali 11 Kali 11 Kali	3 Kali 12 Kali 12 Kali 11 Kali 11 Kali	3 Kali 12 Kali 12 Kali 11 Kali 11 Kali	100% 100% 100% 100% 100%	3 Kali 12 Kali 12 Kali 11 Kali 11 Kali	3 Kali 12 Kali 12 Kali 11 Kali 11 Kali	100% 100% 100% 100% 100%	

**Tabel Realisasi Program Kegiatan Tahun 2021**

N o	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALIS ASI	CAPAIAN (%)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Prosentase penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kotaPersentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100%
2	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%
3	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	Persentase Ketercapaian Target Partisipasi Masyarakat	100%	100%	100%
4	<b>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Persentase Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol & Toga	100%	100%	100%
5	<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</b>	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100%	100%	100%
6	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	100%	100%	100%

### **Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik maka sebagaimana tercantum pada BAB II Pasal 4, mempunyai tugas :

**“Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik”**

Untuk menjalankan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideology Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah kebupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideology Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, socsal dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideology Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah kebupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan;

- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Perubahan sistem pemerintahan daerah yang termuat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Maka dalam konteks mewujudkannya diharapkan peranan perencanaan lebih menonjolkan peran sebagai perumus, fasilitator, mediator dan inovator di dalam pelaksanaan kegiatan.

Tugas Pemerintahan Umum dan Politik adalah tugas yang tidak dilaksanakan Pemerintah pusat (kewenangan Absolut : (1) Politik Luar Negeri (2) Pertahanan (3) Keamanan (4) Hukum (5) Agama (6) Moneter/Keuangan ) bukan urusan konkuren yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan, yang diantaranya :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

**Tabel T.C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor kesbangpol Kabupaten Gresik**

No	Indikator	SPM/standar nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025(thn n)	Tahun2026 (thn n+1)	Tahun2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kesalehan Sosial	-		67,21	69,42	71,16	74	76,95		69,42	71,16	
2.	Percentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
3	Percentase Target Partisipasi Masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
4	Percentase Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	

5	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Percentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Percentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

---

### **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat diliat pada tingkat kondusifitas wilayah kabupaten Gresik. Dalam pencapaian kinerja, pengukuran tingkat keberhasilan dapat diukur melalui program yang telah dilaksanakan dan direncanakan.

Kegiatan evaluasi perencanaan dengan melakukan pengkajian ulang terhadap program dan kegiatan yang dtelah dilaksanakan sebagai tolak ukur dalam melakukan perencanaan pada masa mendatang. Sebagai bagian perencanaan yang memiliki fungsi dasar dalam managemen dengan tujuan untuk mendapat informasi sejauhmana efesiensi dan efektifitas pencapaian sasaran suatu kegiatan.

Evaluasi terhadap perencanaan telah dilakukan dengan baik, walaupun belum semua masalah yang timbul dapat langsung dipecahkan tetapi seluruh kegiatan evaluasi perencanaan telah merujuk kepada peraturan yang berlaku sehingga telah diperoleh gambaran yang komprehensip mengenai pencapaian efisiensi dan efektifitas.

#### **Isu - isu Strategis Bakesbangpol**

Identifikasi beberapa isu strategis yang berkaitan dengan Tupoksi dan peran Bakesbangpol sebagai berikut :

1. Masih adanya pontensi Kerawanan Konflik SARA
2. Masih banyak Ormas dan LSM yang belum berbadan Hukum
3. Kurangnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Umum
4. Kurangnya Komunikasi antara Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda
5. Kurangnya pemahaman kelompok masyarakat terhadap idiosiologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara
6. Kurangnya lembaga keagamaan berperan aktif dalam menjaga kerukunan antar umat beragama

### **Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan**

Menilik dari hasil pengevaluasian dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik maka diharapkan dalam jangka waktu yang singkat dapat dilakukan pemberian dan perbaikan kualitas yang sangat menunjang peningkatan kompetensi dan penjaminan terhadap mutu pembangunan dan sebagai wadah aspirasi masyarakat.

### **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal yang tersusun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Badan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik. Dokumen rencana kinerja mencakup juga informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel TC.31 dibawah ini.

**Tabel T.C. 31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Gresik**

**Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bakesbangpol**

No	Rancangan Awal RKPD				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bakesbangpol	Nilai Kapasitas Internal Organisasi	87	4.672.799.500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bakesbangpol	Nilai Kapasitas Internal Organisasi	87	4.614.134.900	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Persentase Kebutuhan Pelaporan Kinerja Dan Keuangan	100	655.245.100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Persentase Kebutuhan Pelaporan Kinerja Dan Keuangan	100	586.520.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1 3	<b>2</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>3</b> Bakesbangpol	<b>4</b> Persentase penyelesaian administrasi perencanaan dan pelaporan keuangan	<b>5</b> 100	<b>6</b> 3.155.331.000	<b>7</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>8</b> Bakesbangpol	<b>9</b> Persentase penyelesaian administrasi perencanaan dan pelaporan keuangan	<b>10</b> 100	<b>11</b> 3.155.331.000	<b>12</b>
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Persentase kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100	422.281.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Persentase kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	100	432.283.900	

No	Rancangan Awal RKPD				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1 5	<b>2</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>3</b> Bakesbangpol	<b>4</b> Percentase jasa fasilitasi sarana dan prasarana aparatur	<b>5</b> 100	<b>6</b> 158.400.000	<b>7</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>8</b> Bakesbangpol	<b>9</b> Percentase jasa fasilitasi sarana dan prasarana aparatur	<b>10</b> 100	<b>11</b> 158.400.000	<b>12</b>
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol	Percentase fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	100	281.542.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol	Percentase fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	100	281.600.000	
7	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Bakesbangpol	<b>Percentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>100</b>	<b>794.253.750</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Bakesbangpol	<b>Percentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>100</b>	<b>1.700.000.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1 8	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol	Jumlah Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5	794.253.750	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol	Jumlah Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10	1.700.000.000	12
9	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Bakesbangpol	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	100	16.434.882.700	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Bakesbangpol	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	100	16.434.882.500	

No	Rancangan Awal RKPD				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3 Bakesbangpol	4 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	5	6 <b>16.434.882.700</b>	7 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8 Bakesbangpol	9 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD	10	11 <b>16.434.882.500</b>	12
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Bakesbangpol	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar	100	200.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Bakesbangpol	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar	100	200.179.550	
11											

No	Rancangan Awal RKPD				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
12	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol	Persentase Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol & Toga	100	200.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol	Persentase Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol & Toga	100	200.179.550	12
13	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Bakesbangpol	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100	900.000.000	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Bakesbangpol	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100	800.000.000	
14	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bakesbangpol	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100	900.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bakesbangpol	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100	800.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1 15	2 <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	3 Bakesbangpol	4 Percentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	5 100	6 600.000.000	7 <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	8 Bakesbangpol	9 Percentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	10 100	11 600.000.000	12
18	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD		600.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD		600.000.000	
<b>JUMLAH</b>				<b>23.601.935.950</b>	<b>JUMLAH</b>				<b>24.349.017.400</b>		

### **Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Selaku Badan yang memiliki Tanggung Jawab dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Dalam pelaksanaannya melalui program dan kegiatan yang direncakan adalah:

No	Program
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>
3	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>
4	<b>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>
5	<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</b>
6	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik mempunyai beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang program yang telah ditetapkan yaitu :

No	Program/kegiatan /sub kegiatan
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

No	Program/kegiatan /sub kegiatan
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
IV	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
V	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
VI	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

**Tabel T.C.32.**  
**Usulan Program dan kegiatan Para Pemangku Kepentingan tahun 2023**  
**Kabupaten Gresik**

NO	Program / kegiartan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bakesbangpol	Prosentase penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	4.614.134.900,00	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Jumlah laporan perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	586.520.000,00	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan perangkat daerah yang terbayar	3.155.331.000,00	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bakesbangpol	Jumlah Administrasi Umum perangkat Daerah yang disediakan	432.283.900,00	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	158.400.000,00	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bakesbangpol	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara	281.600.000,00	

NO	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
9	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Bakesbangpol	<b>Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>1.700.000.000,00</b>	
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol	Jumlah Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.700.000.000,00	
11	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Bakesbangpol	<b>Persentase Ketercapaian Target Partisipasi Masyarakat</b>	<b>16.434.882.500,00</b>	
12	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Bakesbangpol	Percentase Partisipasi Masyarakat	16.434.882.500,00	
13	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Bakesbangpol	<b>Persentase Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol &amp; Toga</b>	<b>200.000.000,00</b>	

NO	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
14	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol	Persentase Pembinaan LSM, OKP, Tomas, Orsospol & Toga	200.179.550,00	
15	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Bakesbangpol	<b>Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi</b>	<b>800.000.000,00</b>	
16	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bakesbangpol	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	800.000.000,00	
17	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAANNASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Bakesbangpol	<b>Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa</b>	<b>600.000.000,00</b>	
18	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	600.000.000,00	
<b>JUMLAH</b>				<b>24.349.017.400,00</b>	

**BAB III****TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam upaya Menciptakan bentuk sinkronisasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka diharapkan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik merupakan implementasi dari program nasional yang bertujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, adapun kegiatan secara nasional dilaksanakan melalui melalui 6 (enam) kegiatan yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
3. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional;
4. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan;
5. Fasilitasi Politik Dalam Negeri; serta
6. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi.

Sehingga diharapkan pada akhirnya program/kegiatan/sub kegiatan yang berjalan mampu bereperan secara totalitas terhadap index pembangunan manusia di Kabupaten Gresik dan tepat sasaran. Hal ini kemudian menjadi dasar penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki fungsi:

- a. Merumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Mengadakan Pembinaan hubungan dengan Partai Politik, Partai Politik peserta Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Instansi maupun Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem politik ;
- c. Melakukan pembinaan wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran bela Negara, dan pembinaan kerukunan umat beragama ;
- d. Melaksanakan pembinaan pembauran bangsa serta pengawasan dan pemantauan kegiatan orang asing dan/ atau LSM asing ;
- e. Melakukan pengumpulan data dan informasi di bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya untuk dikaji sebagai bahan masukan bagi Kepala Daerah

dalam menciptakan suasana yang aman dan damai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- f. Memfasilitasi pelaksanaan kemajuan dan peningkatan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- g. Mengadakan suatu perencanaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

### **Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Pencapaian tujuan dan sasaran terhadap penyusunan Rencana Kerja Tahunan mengacu pada rencana strategis ( Renstra ) yang telah ditetapkan, dimana penjelasan dan deskripsi terhadap renja telah ditetapkan melalui evaluasi, monitoring dan pengawasan kegiatan serta mempertimbangkan terhadap alokasi dan kemampuan sumber daya organisasi dalam mendukung kegiatan atau operasionalnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bagian dari pemerintahan daerah dan memiliki mempunyai tujuan menurunnya konflik.

Dalam rangka mencapai tujuan dimaksud maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan penetapan sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Satuan Lembaga Pendidikan;
- b. Terwujudnya Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- c. Terwujudnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- e. Terwujudnya Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

.

Selanjutnya masing-masing sasaran ditetapkan kebijaksanaan dan pada masing-masing kebijaksanaan ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait dan berjalan secara efektif dan efisien.

### **Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Berkaitan dengan Visi dan Misi Kabupaten Gresik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan sebagai “**fasilitator**” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

- a. Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan :
  1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;
  2. Pencapaian SDGs;
  3. Pengentasan Kemiskinan
  4. Pencapaian NSPK dan SPM
  5. Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM di masyarakat;
  6. Peningkatan tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan Kabupaten Gresik;
  7. Pengawasan dan pemeliharaan kondusifitas wilayah kabupaten gresik;
  8. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (outcome).
- b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan antara lain meliputi :
  1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan  
Program dan Kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Gresik pada Tahun 2023, Jumlah Program sebanyak 6 program dan Jumlah Kegiatan sebanyak 12 kegiatan, yaitu sebagai berikut :

No	Program/kegiatan /sub kegiatan
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
IV	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
V	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
VI	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021, untuk total pagu yang diusulkan **Rp. 24.349.017.400,00**

- c. Kesesuaian Rumusan Program dan Kegiatan antara Rancangan Awal RKPD dengan Renja SKPD

Program dan Kegiatan yang dirancang Bappeda Kabupaten Gresik tahun 2023 terdiri dari :

Program Utama

1. *Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial*

Program ini bertujuan untuk mewujudkan rasa aman dalam Pencegahan dan penanganan konflik dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Gresik.

2. *Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Pengembangan Etika Politik*

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan Ormas dalam berdemokrasi yang jujur, adil dan beretika.

3. *Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kerukunan dan pembauran*

Program ini bertujuan untuk lebih meratakan dan mensosialisasi secara luas mengenai wawasan kebangsaan, kerukunan dan pembauran dengan menggandeng Ormas, Orpol, LSM, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
Nasional	Daerah														
8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,672,799,500						4,102,572,427		
8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			655,245,100						329,999,627		
8	01	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	325,245,500	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	6 Dokumen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja OPD	7 Dokumen	329,999,600	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	7 Dokumen	329,999,627	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,155,331,000						3,155,331,000		
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3,155,331,000	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	12 Bulan	3,155,331,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			422,281,400						143,641,800		
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	44 Jenis	281,924,000	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	44 Jenis	24,470,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan Dan Minuman	1 Tahun	19,787,000	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	1 Tahun	5,863,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan Dan Penggandaan	12 Jenis	16,964,400	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	12 Jenis	9,708,800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Surat Kabar	3 Jenis	3,600,000	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	3 Jenis	3,600,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi	1 Tahun	100,006,000	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	1 Tahun	100,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>158,400,000</b>						<b>158,400,000</b>	
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksana Tugas ASN	6 Orang	158,400,000	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	6 Orang	158,400,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>281,542,000</b>						<b>315,200,000</b>	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	134,400,000	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	1 Unit	134,400,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	67,200,000	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	2 Unit	100,800,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meja dan Kursi	40 Buah	0	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	40 Buah	20,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	28 Unit	20,050,000	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	28 Unit	60,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	59,892,000	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	2 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02			<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCA SILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>			<b>794,253,750</b>					<b>1,700,000,000</b>		
8	01	02	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>			<b>794,253,750</b>					<b>1,700,000,000</b>		
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pelaksanaan Upacara Hari-hari Besar Nasional dan HUT Pemda	14 Kali	394,253,750	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	14 Kali	1,300,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Fasilitasi Hibah FPK Jumlah Sosialisasi Penyelenggaraan Toleransi	1 Tahun 8 Kali	400,000,000	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	1 Tahun 8 Kali	400,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>			<b>16,434,882,700</b>					<b>112,934,882,500</b>		
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			16,434,882,700					<b>112,934,882,500</b>		

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah			
8	01	03	2.01	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Desa dan Kelurahan Yang Mendapat Sosialisasi Pendidikan Politik Jumlah Koordinasi Pemilihan Umum Jumlah Partai Politik Yang Dibina Jumlah Pelaporan Pemilihan Umum Jumlah Pemantauan Pemilihan Umum Jumlah Persiapan Pemilihan Umum Jumlah Sosialisasi Pemilihan Umum	356 Desa/Kelurahan 12 Kali 16 Partai Politik 12 Kali 12 Kali 12 Kali 4 Kali	640,000,200	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	356 Desa/Kelurahan 12 Kali 16 Partai Politik 12 Kali 12 Kali 12 Kali 4 Kali	1,140,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	2.01	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Fasilitasi Hibah BAWASLU Fasilitasi Hibah BK Partai Politik Fasilitasi Hibah KPU	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	15,794,882,500	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	111,794,882,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

8	01	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>			200,000,000						200,000,000		
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			200,000,000						200,000,000		
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, PemberdayaanOrmas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Fasilitasi Hibah LSM dan ORMAS Jumlah LSM dan ORMAS yang Dibina	1 Tahun 50 LSM dan ORMAS	200,000,000	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	1 Tahun 50 LSM dan ORMAS	200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>			900,000,000						900,000,000		
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			900,000,000						900,000,000		

8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Fasilitasi Hibah FKUB	1 Tahun	600,000,000	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	1 Tahun	600,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Satgas Toleransi Kehidupan Bermasyarakat Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Tim P4GN Jumlah Fasilitasi FKUB	11 Kali 2 Kali 11 Kali	300,000,000	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	11 Kali 2 Kali 11 Kali	300,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>			600,000,000					600,000,000		
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			600,000,000					600,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah			
8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	5 Dokumen	0	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	5 Dokumen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	993 Orang	0	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	993 Orang	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi FKDM Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Tim Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Jumlah Fasilitasi Hibah FKDM Jumlah Pemantauan Pengamanan Hari-hari Besar Jumlah Pemantauan Pengamanan Pejabat Jumlah Pemantauan Pengamanan Unjuk Rasa	11 Kali 11 Kali 1 Tahun 3 Kali 12 Kali 12 Kali	600,000,000	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	11 Kali 11 Kali 1 Tahun 3 Kali 12 Kali 12 Kali	600,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	24 Laporan	0	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	24 Laporan	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	0	Kab. Gresik, Kebomas, Dahanrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	12 Dokumen		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**BAB V**  
**PENUTUP**

Sebagai pedoman arah pelaksanaan organisasi maka Rencana Kerja (Renja) berperan penting. Mengingat semua kegiatan yang tercantum dalam Renja merupakan implementasi terhadap eksistensi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebab di dalam renja juga tercantum mengenai Output Rencana Kerja dalam perencanaan Program Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik yang sesuai dengan Tupoksi dan Sasaran yang telah dibebankan kewenangannya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahunan tahun 2023, dengan berdasarkan azaz perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2023 yang akan datang.

Gresik, 18 Juli 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN GRESIK**



**NANANG SETIAWAN, S.I.P., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700105 199003 1 008